

KUESIONER
PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA 2022
(DISESUAIKAN DENGAN INDIKATOR SDGs)

I. KETERANGAN PROVINSI

1	PROVINSI	SUMATERA BARAT
2	NOMENKLATUR DINAS	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	TIPE (KLASIFIKASI) DINAS	B
4	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	19
5	ALAMAT DINAS	Jalan Ujung Gurun No. 7 Padang
6	TELEPON / FAX	0751-27417 / 0751-27341
7	EMAIL	programnakertrans@yahoo.com
8	WEBSITE	

II. RINGKASAN UMUM

1	JUMLAH PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, DAN BESAR	0
2	JUMLAH PERUSAHAAN WAJIB LAPOR	0
3	JUMLAH BALAI LATIHAN KERJA (BLK)	0

III. RINGKASAN SDGs

1	JUMLAH NEET	0	[VI.4]
2	JUMLAH ANAK (10 - 17 TH) YANG BEKERJA	0	[VI.7]
3	JUMLAH SETENGAH PENGANGGUR (konsep SDGS)	0	[VI.18]
4	JUMLAH TENAGA KERJA FORMAL	0	[VI.9]
5	JUMLAH LPINP	0	[VI.14]
6	JUMLAH LPINP LAKI-LAKI	0	[VI.15]
7	JUMLAH LPINP PEREMPUAN	0	[VI.16]
8	JUMLAH LPIP	0	[VI.17]
9	NILAI PDRB (HARGA KONSTAN 2010)	Rp. 0 Rp. 0	[VIII.26] [VIII.27]
10	JUMLAH KECELAKAAN KERJA	0	[VII.C.17]

IV. KETERANGAN PETUGAS PUSAT

NAMA	NIP	POSISI	JABATAN	URAIAN JABATAN	TANDA TANGAN
Data tidak ditemukan.					

V. KETERANGAN PETUGAS PUSAT

NAMA	NIP	JABATAN	URAIAN JABATAN	TANDA TANGAN
Data tidak ditemukan.				

VI. DATA KETENAGAKERJAAN UMUM

1	Jumlah Penduduk Usia 10 - 17 Tahun	0
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja Umur 15 - 24 Tahun	0
3	Jumlah Penduduk Usia Kerja Umur 15 - 24 Tahun Yang Masih Bersekolah	0
4	Penduduk Usia Kerja Umur 15-24 Tahun Yang Tidak Sedang Bekerja, Tidak Sedang Bersekolah Dan Tidak Sedang Mengikuti Pelatihan (<i>Not in Employment, Education and Training/NEET</i>)	0
5	Jumlah Angkatan Kerja	0
6	Jumlah Penduduk Yang Bekerja:	
	a. Tahun 2020 (Agustus)	0
	b. Tahun 2021 (Agustus)	0
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0%
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-laki	0%
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	0%
10	Jumlah Angkatan Kerja Lulusan SMK	0
11	Jumlah Angkatan Kerja Lulusan Diploma	0
12	Jumlah Pekerja Keluarga/tak dibayar (Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.)	0
13	Jumlah Pekerja dengan akses internet	0
14	Jumlah Penduduk yang Bekerja Lulusan SMK	0
15	Jumlah Penduduk yang Bekerja Lulusan Diploma	0
16	Rata-rata Upah Pekerja Laki-laki	0
17	Rata-rata Upah Pekerja Perempuan	0
18	Rata-rata Upah Sektor Industri	0
19	Rata-rata Upah Sektor Jasa	0
20	Rata-rata upah sektor dengan upah tertinggi	0
21	Rata-rata upah sektor dengan upah terendah	0
22	Rata-rata Jam Kerja	0
23	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Umur 10-17 Tahun	0
24	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Umur 15-24 Tahun	0

25	Jumlah Penduduk Yang Bekerja secara Formal (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Berkode 3 dan 4)	0
26	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Non-Pertanian (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja di sektor pertambangan, industri, LGA, konstruksi, perdagangan, angkutan & telekomunikasi, jasa keuangan, serta jasa lainnya)	0
27	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Pertanian	0
28	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Non-Pertanian Dan Berjenis Kelamin Laki-Laki (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja berjenis kelamin laki-laki di sektor pertambangan, industri, LGA, konstruksi, perdagangan, angkutan & telekomunikasi, jasa keuangan, serta jasa lainnya)	0
29	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Non- Pertanian Dan Berjenis Kelamin Perempuan (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja berjenis kelamin perempuan di sektor pertambangan, industri, LGA, konstruksi, perdagangan, angkutan & telekomunikasi, jasa keuangan, serta jasa lainnya)	0
30	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Secara Informal Di Sektor NonPertanian / LPINP (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama berkode 1,2,5,6 dan 7 dan berada di sektor pertambangan, industri, LGA, konstruksi, perdagangan, angkutan & telekomunikasi, jasa keuangan, serta jasa lainnya)	0
31	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Secara Informal Di Sektor NonPertanian Dan Berjenis Kelamin Laki-Laki / LPINP Laki-Laki (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama berkode 1,2,5,6 dan 7, berjenis kelamin laki-laki dan berada di sektor pertambangan, industri, LGA, konstruksi, perdagangan, angkutan & telekomunikasi, jasa keuangan, serta jasa lainnya)	0
32	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Secara Informal Di Sektor NonPertanian Dan Berjenis Kelamin Perempuan / LPINP Perempuan (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama berkode 1,2,5,6 dan 7, berjenis kelamin perempuan dan berada di sektor pertambangan, industri, LGA, konstruksi, perdagangan, angkutan & telekomunikasi, jasa keuangan, serta jasa lainnya)	0
33	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Secara Informal Di Sektor Pertanian / LPIP (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama berkode 1,2,5,6 dan 7 dan berada di sektor pertanian)	0
34	Jumlah Setengah Penganggur (Konsep SDGs) (Dalam Sakernas Agustus adalah Penduduk Yang Bekerja kurang dari 35 jam seminggu / pekerja tidak penuh atau merupakan jumlah dari setengah penganggur terpaksa dan pekerja paruh waktu)	0
35	Jumlah Penganggur	0
36	Jumlah Penganggur Terbuka dengan Tingkat Pendidikan SMTP dan SMTA	SMTP : 0 SMTA : 0

CATATAN

-

VII. DATA KETENAGAKERJAAN KHUSUS

VII. A. PERENCANAAN TENAGA KERJA

1	Data dan Informasi mengenai Dokumen Rencana Ketenagakerjaan Provinsi	
	a. Rencana Ketenagakerjaan Provinsi yang masih berlaku	<input type="radio"/> ADA <input checked="" type="radio"/> TIDAK ADA
	b. Masa berlaku Dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi	-
	c. Dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi sudah menjadi Acuan Pembangunan Pemerintah Provinsi	<input type="radio"/> ADA <input checked="" type="radio"/> TIDAK ADA
	d. Periode (tahun) saat Dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi dijadikan Acuan Pembangunan Pemerintah Provinsi	-
	e. Butir dalam Dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi yang dijadikan Acuan Pembangunan Pemerintah Provinsi	<input type="checkbox"/> Angka Pengangguran <input type="checkbox"/> Jumlah Pekerja Formal & Informal <input type="checkbox"/> Penduduk Bekerja Menurut Sektor <input type="checkbox"/> Angkatan Kerja Muda <input type="checkbox"/> Pekerja Muda <input type="checkbox"/> Rekomendasi Kebijakan <input type="checkbox"/> Lainnya (Program, Kegiatan dan Pembiayaan yang di dukung oleh APBD Provinsi) <input type="text"/>
	f. Bentuk penerapan dan pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Provinsi dalam proses pembangunan ketenagakerjaan di wilayah Saudara	<input type="checkbox"/> Target-targetnya sudah dimasukan dalam RPJMD <input type="checkbox"/> Diaplikasikan dalam Kegiatan Sektoral <input type="checkbox"/> Diaplikasikan dalam Kegiatan Unit Teknis Dinas Ketenagakerjaan Provinsi <input type="checkbox"/> Lainnya (Program, Kegiatan dan Pembiayaan yang di dukung oleh OPD sektoral pada APBD Provinsi) <input type="text"/>
	g. Alasan Pemerintah Provinsi tidak mempunyai Rencana Ketenagakerjaan Provinsi yang masih berlaku	<input type="checkbox"/> Sudah tidak berlaku <input type="checkbox"/> Tidak dianggarkan dalam APBD <input type="checkbox"/> Tidak lagi memiliki Tugas & Fungsi Penyusun PTK (Re-organisasi) <input type="checkbox"/> Lainnya (program, kegiatan dan pembiayaan yang di dukung oleh OPD sektoral pada APBD Provinsi) <input type="text"/>
2	Data dan Informasi mengenai Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	

	a. Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	<input type="radio"/> ADA <input checked="" type="radio"/> TIDAK ADA
	b. Dasar Pembentukan Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	<input type="radio"/> Keputusan Gubernur <input type="radio"/> SK Kepala Dinas <input checked="" type="radio"/> Lainnya (program, kegiatan dan pembiayaan yang di dukung oleh OPD sektoral pada APBD Provinsi) <input type="text"/>
	c. Masa Berlaku Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	-
	d. Alasan Pemerintah Provinsi tidak mempunyai Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	<input type="checkbox"/> Sudah tidak berlaku <input type="checkbox"/> Tidak dianggarkan dalam APBD <input type="checkbox"/> Tidak lagi memiliki Tugas & Fungsi Penyusun PTK (Re-organisasi) <input type="checkbox"/> Lainnya (program, kegiatan dan pembiayaan yang di dukung oleh OPD sektoral pada APBD Provinsi) <input type="text"/>
3	Data dan Informasi mengenai Tugas dan Fungsi untuk melaksanakan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi di wilayah Saudara	
	a. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi memiliki Unit Kerja (Bidang/Seksi/Sub Bagian) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi	<input type="radio"/> YA (Penjabaran Tugas dan Fungsi Pergub) <input checked="" type="radio"/> TIDAK
	b. Nama Unit Kerja (Bidang/Seksi/Sub bagian) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi	<input type="radio"/> Sub bagian Program <input type="radio"/> Bidang Penempatan <input type="radio"/> Lainnya <input type="text"/>
4	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Saudara yang telah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	Kota

VII. B. PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

5	Data mengenai BLK Milik Pemerintah Pusat/Kemnaker (UPTP) di wilayah Saudara	
	a. Jumlahnya	0
	b. Total daya tampungnya	0
	c. Jumlah Lulusannya	0
6	Data mengenai BLK Milik Pemerintah Kabupaten/Kota (UPTD Kabupaten/ Kota) di wilayah Saudara	

	Kabupaten / Kota	Jumlah yang Masih Aktif	Total Daya Tampungnya	Jumlah Lulusannya	Sudah Terakreditasi
	Jumlah	0	0	0	
7	Data mengenai BLK Milik Pemerintah Provinsi (UPTD Provinsi) di wilayah Saudara				
	a. Jumlahnya	0			
	b. Total daya tampungnya	0			
	c. Jumlah Lulusannya	0			

8	Jumlah Lembaga Latihan yang dimiliki Dinas/Instansi lain , yang melatih Penganggur di wilayah Saudara				
	Nama Dinas / Instansi	Jumlah yang Masih Aktif	Total Daya Tampungnya	Jumlah Lulusannya	Sudah Terakreditasi
	Jumlah	0	0	0	
9	Jumlah Pencari Kerja (Penganggur) yang Dilatih oleh Lembaga Latihan Swasta yang Dibiayai APBD				0
10	Jumlah Lembaga Pelatihan milik swasta (Lembaga Pelatihan Kerja/LPK) di wilayah Saudara				0
11	Jumlah Lembaga Pelatihan di wilayah Saudara yang sudah Terakreditasi				
	a. UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota				0
	b. LPK Swasta				0
	c. UPT (K/L Lainnya)				0
12	Jumlah Alumni Pelatihan Bersertifikat Kompetensi				
	a. Kemnaker				0
	b. Disnaker				0
	c. K/L Lain				0
	d. OPD Lain				0
	e. Swasta				0
13	Jumlah Alumni Pelatihan yang telah bekerja atau berwirausaha				
	a. Kemnaker				0
	b. Disnaker				0
	c. K/L Lain				0
	d. OPD Lain				0
	e. Swasta				0
14	Penempatan Tenaga kerja				
	a. Kemnaker				0
	b. Disnaker				0
	c. K/L Lain				0
	d. OPD Lain				0
15	Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar				0

VII. C. PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

16	Jumlah Perusahaan Kecil, Menengah, dan Besar di wilayah Saudara menurut Data Sensus Ekonomi 2016	
	a. Kecil	0
	b. Menengah	0
	c. Besar	0
17	Jumlah Perusahaan yang sudah Melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan sesuai ketentuan UndangUndang No. 7 Tahun 1981 di wilayah Saudara	0
18	Jumlah Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang sudah Melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan di wilayah Saudara (Permenaker No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 4 Tahun 2019)	0
19	Jumlah Perusahaan yang sudah Di-Audit Penerapan SMK3 di wilayah Saudara (Audit SMK3 berlaku untuk 3 tahun, isikan data tahun 2019, 2020, dan 2021)	0
20	Jumlah Perusahaan yang mengalami/terdapat kasus kecelakaan kerja di wilayah Saudara	0
21	Jumlah Perusahaan yang Sudah Membentuk Panitia Pembina K3 (P2K3)	0
22	Jumlah Perusahaan yang WAJIB menerapkan Norma K3	0
23	Jumlah Pekerja/Buruh yang mengalami kecelakaan kerja di wilayah Saudara	0

VII. D. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

24	Jumlah Perusahaan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan (PP berlaku 2 tahun, isikan data tahun 2020 dan 2021)	0
25	Jumlah Perusahaan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama yang sudah didaftarkan	0
26	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan >50 orang (Wajib membentuk LKS Bipartit)	0
27	Jumlah Perusahaan yang memiliki Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit	0
28	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Saudara (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	0
29	Data Pengupahan di wilayah Saudara :	
	a. Besaran UMP yang berlaku di tahun 2021	0
	b. Upah rata-rata pekerja/bulan	0
	c. Rata-rata jam kerja pekerja/bulan	0
	d. Lampirkan Daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021	
	Kabupaten / Kota	UMK
30	Jumlah Perusahaan yang menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan aktif	0
31	Jumlah Pekerja yang terdaftar menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Aktif untuk kategori sebagai berikut :	
	a. Penerima Upah	0
	b. Pekerja Mandiri dan Bukan Penerima Upah	0
	c. Pekerja Jasa konstruksi	0
32	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:	
	a. Perjanjian Bersama	0
	b. Anjuran	0
	c. Pengadilan Hubungan Industrial	0
33	Jumlah Perusahaan yang telah menyusun Struktur Skala Upah	0
34	Jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh	0

CATATAN

-

VIII. DATA LAINNYA

35	Jumlah Total APBD 2021	0
36	Jumlah Total APBD 2020	0
37	Alokasi APBD Untuk Pelatihan Kerja	0
38	Total PDRB Tahun 2021 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010	Rp. 0
39	Total PDRB Tahun 2022 Atas dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010	Rp. 0

CATATAN

-